

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 PENELITIAN TERDAHULU

Peneitian menggunakan refrensi dari peneitian terdahulu untuk dijadikan perbedaan atau rujukan dalam melakukan peneitian, adapun penelitian tersebut sebagai berikut:

**Tabel 1. Matriks Penelitian Terdahulu**

No	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Pokok Masalah	Tujuan	Metode	Hasil Peneltian
1.	Mirnawati, Amka dan Imam Yowono (2020)	Implementasi Pendidikan Inklusif di Universitas Lambung Mangkurat Perspektif Mahasiswa Disabilitas Terhadap Kinerja Vounteer	Peraturan menteri riset, teknologi dan pendidikan tinggi republik Indonesia nomor 46 tahun 2017 yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa difabel untuk mengenyam pendidikan di	Mengetahui sudut pandang mahasiswa difabel terhadap pelaksanaan pendidikan inklusif di Universitas Lambung Mangkurat, khususnya jurusan pendidikan luar biasa.	Metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif	menunjukkan perspektif mahasiswa difabel pada mahasiswa tunarungu cukup terbantu dengan adanya volunteer yang mendampingi selama mengikuti pembelajaran dikampus, namun mahasiswa tersebut kesulitan

			perguruan tinggi			<p>mengikuti kegiatan belajar mengajar apabila tidak didampingi, hal ini terjadi karena pendamping juga seorang mahasiswa yang memiliki kesibukan tersendiri. Ketika yang dialami berupa pendamping yang memiliki keterbatasan dalam menguasai bahasa isyarat, sehingga ketika ada materi yang mengandung kata</p>
--	--	--	------------------	--	--	--

						ilmiah menjadi lebih sulit untuk diterjemahkan.
2.	Putu Ayu Mira Kusuma Dewidan I Nyoman Subanda (2017)	Implementasi Kebijakan Inklusif Di Kabupaten Buleleng	Tidak ada kesetaraan pendidikan antara siswa difabel dengan siswa biasa dalam pendidikan.	Untuk menganalisa pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah dasar sebagai penyelenggara pendidikan inklusif di Kabupaten Buleleng dan menganalisa faktor penunjang dan penghambat kebijakan pendidikan inklusif.	Analisis data menggunakan metode kualitatif	menunjukkan implementasi kebijakan pendidikan inklusif sudah berjalan dengan menunjukkan dua sekolah, namun implementasinya masih belum berjalan dengan optimal karena kurangnya sosialisasi pemerintah Kabupaten Buleleng terhadap sekolah

						yang ditunjuk, sumber daya manusia masih kurang secara kualitas dan kuantitas dan sumber daya keuangan yang terbatas, peran orang tua yang minim karena kurangnya pengetahuan dan perspektif ,masyarakat yang keliru tentang pendidikan anak berkenutuhan khusus.
--	--	--	--	--	--	---

3.	Ika Arinia Indriyani (2017)	Kebijakan Pendidikan Inklusif Implementasi Yang Abai Konteks Lingkungan Sosial	Persepsi masyarakat yang masih belum tereduksi terkait anak berkebutuhan khusus, sehingga masyarakat masih enggan bergaul dengan anak berkebutuhan khusus.	Mengetahui implementasi kebijakan pendidikan inklusi di Yogyakarta	Metode penelitian kualitatif deskriptif	menunjukkan masih kurangnya sosialisasi oleh pemerintah terhadap sekolah dan masyarakat. Ada sekolah yang tidak bisa menerima siswa difabel karena fasilitasnya belum memadai. Ada pemindahan siswa difabel dari sekolah reguler ke sekolah luar biasa karena wali murid dari siswa tidak ingin anaknya bersosialis
----	-----------------------------	--	--	--	---	---

						asi dengan siswa difabel dan pemahaman masyarakat terkait siswa difabel masih keliru.
4.	Azizah Febrianti Fasha, Dra. Wina Widowati, M.Si (2017)	Evaluasi penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Tingkat Sekolah dasar di Kecamatan Koja Jakarta Utara	akomodasi yang kurang memadai dalam pelaksanaan pendidikan inklusif di Kecamatan Koja Jakarta Utara, seperti sarana prasarana serta aksesibilitas yang masih minim	Untuk menguraikan implementasi pendidikan inklusif dan faktor penunjang serta penghambatnya pada tingkat pendidikan dasar	Metode penelitian menggunakan kualitatif deskriptif.. siswa difabel.	Menunjukkan sudah ada edaran pelaksanaan pendidikan inklusif namun teknis pelaksanaannya tidak ada, belum ada sumber daya manusia yang mumpuni karena guru pendamping khusus belum tersedia dan yang

						bertanggung jawab atas murid difabel ditangani oleh guru umum, sarana prasarana cukup memadai karena terdapat alat – alat peraga pelatih perkembangan siswa difabel, respon warga sekolah terhadap siswa difabel cukup terbuka dengan penerimaan
5.	Robiatul Munajah, Arita Marini,	Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif	Ditunjukkan SDN 13 Pandeglang sebagai	Untuk mengurangi gejala dalam pelaksanaan	Metode penelitian yang digunakan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa

	dan Muham mad Syarif Sumant ri (2021)	di Sekolah Dasar”.	sekolah inklusif sehingga memerluk an banyak masukan.	an pendidika n inklusif di pendidika n dasar.	adalah kualitatif .	faktor pendukun g program pendidika n inklusif berupa adanya kerjasama antara kepala sekolah, guru, dinas pendidika n dan masyaraka t. Namun terdapat faktor penghamb at yang mana persepsi masyaraka t yang beranggap an bahwa siswa difabel tidak bisa apa – apa dan juga terdapat penolakan dari orang tua murid lain yang
--	---	-----------------------	--	--	---------------------------	--



						tidak ingin anaknya satu kelas dengan siswa difabel. Selain itu sarana prasarana masih belum memadai, tenaga pendidik belum memiliki pengetahuan menangani siswa difabel, dan belum ada kurikulum yang dibuat untuk sekolah inklusif. Upaya yang dilakukan yaitu sosialisasi kepada wali murid
--	--	--	--	--	--	--

						untuk memberikan pemahaman tentang sekolah inklusif, pelatihan dan workshop untuk para tenaga pendidik untuk meningkatkan kualitas pengajar, pihak sekolah dan dinas pendidikan melakukan pengembangan kurikulum sekolah inklusif, dan sekolah berusaha melengkapi sarana prasaran yang ada.
--	--	--	--	--	--	--

6.	Maysusi Indri Hapsari (2019)	Implementasi Pendidikan Inklusif di SDN 3 Karangrejo Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi	Kebijakan pendidikan inklusif di Kabupaten Banyuwangi yang memilih Sekolah Dasar Negeri Karangrejo sebagai penyelenggara pendidikan inklusif sehingga memerlukan banyak perhatian..	Untuk menguraikan pelaksanaan pendidikan inklusif Sekolah Dasar Negeri Karangrejo, Kabupaten Banyuwangi	Metode penelitian menggunakan kualitatif deskriptif	Menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan inklusif sudah baik, namun ada beberapa kendala dalam kuantitas dan kualitas guru dan guru pendamping masih belum memadai. Selain itu dari segi pembiayaan dan sarana prasarana juga masih kurang memadai.
7.	, Ika Devy Pramudiana (2017)	Implementasi Kebijakan Inklusif Untuk	masih ada anak dengan keterbatasan yang	Menguraikan pelaksanaan pendidikan	Penelitian ini menggunakan metode	Menunjukkan bahwa perhatian dari orangtua,

		ABK Di Surabaya	belum mendapatkan hak dalam mengenyam pendidikan, stigma masyarakat yang masih keliru tentang anak bekebutuhan khusus, sekolah yang menyelenggarakan program pendidikan inklusif masih banyak kekurangan	n inklusif di Kota Surabaya serta mengulik hambatan yang dialami.	kualitatif deskriptif.	masyarakat, tenaga ahli dan pemerintah masih kurang, fasilitas penunjang siswa difabel juga masih beum memadai. Orang tua masih kurang peduli karena belum ada pembinaan atau sosialisasi terkait penanganan anak berkebutuhan khusus.
--	--	-----------------	--	---	------------------------	--

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah diuraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pendidikan inklusif di berbagai tingkat sekolah dan daerah di Indonesia sudah mulai dijalankan dan membawa perubahan baik dalam memberikan kesempatan bagi siswa difabel untuk bersekolah. Meskipun masih banyak kekurangan dalam programnya baik dalam sarana prasarana maupun lainnya.

Dalam penelitian terdahulu yang menjadi fokus dalam penelitian mengenai program pendidikan inklusif diantaranya implementasi dan evaluasi pendidikan inklusif. Selain itu perbedaan dalam penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan terletak pada teori yang digunakan. Disini peneliti mencoba menggali hal baru dengan melihat dari perspektif yang berbeda dengan fokus penelitian Implementasi Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 06 Tahun 2011 tentang Pendidikan Khusus dan Layanan Pendidikan Khusus di Masa Pandemi, sehingga dalam penelitian ini mencoba mengulik dan mendeskripsikan Implementasi Pendidikan Inklusif sesuai dengan peraturan tersebut.

## **2.2 Landasan Teori**

### **2.2.1 Kebijakan Publik**

Kebijakan publik akan selalu ada dalam kehidupan manusia baik individu maupun masyarakat dalam bernegara (Wahab S. A., Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Malang : UMM Press : dari formulasi ke implementasi kebijakan negara, 2008). Kebijakan publik merupakan landasan yang mengontrol aksi yang ditentukan kepada sasaran – sasaran tertentu. Kebijakan selalu berorientasi pada permasalahan dan berorientasi pada aksi sehingga kebijakan juga bisa dipahami sebagai suatu keputusan yang berdasar landasan untuk menunjukkan kaidah – kaidah yang dibuat melalui aksi secara terorganisir dan konstan dalam meraih tujuan tertentu (Suharto, 2008).

Kebijakan publik merupakan ketetapan yang telah ditentukan yang secara langsung mengatur sumber daya manusia, alam, keuangan demi kepentingan umum. Ditinjau dari proses, kebijakan publik merupakan hasil dari berbagai gagasan, teori dan kepentingan yang saling bergesekan sebagai bentuk sistem politik bernegara. Oleh karena itu, kebijakan merupakan alat pemerintah untuk melakukan aksi – aksi tertentu, seperti kesehatan, pendidikan, fasilitas umum, kesejahteraan dan lain – lain yang dianggap membawa pengaruh baik untuk masyarakat umum (Wahab S. A., Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Malang : UMM Press : dari formulasi ke implementasi kebijakan negara, 2008)

Menurut Anderson dalam (Winarmo, 2014) kebijakan publik adalah petunjuk aksi yang memiliki arti sesuatu yang ditentukan oleh pemangku kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan. Menurut Robert Eyestone

dalam (Winarmo, 2014) secara makro kebijakan publik merupakan hubungan antar unsur – unsur pemerintah, pemerintah dengan swasta, pemerintah dengan masyarakat, pemerintah dengan lingkungan. Jadi kebijakan publik merupakan keputusan - keputusan yang dibuat dengan landasan tertentu untuk mencapai tujuan.

### **2.2.2 Implementasi Kebijakan**

Implementasi kebijakan merupakan suatu usaha yang dilakukan pemerintah dengan melaksanakan alternatif yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan (Islamy, 2003). Menurut Van meter dan Van Horn dalam (Wahab S. , 2005), implementasi kebijakan merupakan aksi – aksi aktual yang dilakukan oleh stakeholder yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan yang telah disepakati. Sedangkan implementasi kebijakan menurut Dunn adalah mengontrol pelaksanaan kebijakan dalam target waktu yang ditetapkan. Menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Wahab (2008: 23) implementasi kebijakan adalah mengetahui dan memahami acuan berupa aturan dari suatu program yang telah disahkan dan berlaku untuk selanjutnya dilakukan aktivitas – aktivitas program yang dapat berpengaruh positif untuk publik. Menurut George C. Edward III implementasi kebijakan merupakan kebijakan yang dinamis dalam prosesnya yang mana ada beberapa faktor yang saling mempengaruhi keberhasilan kebijakan (Ramadi, 2012). Menurut Merille S. Grindle (Ramadi, 2012, hal. 6). implementasi merupakan upaya merealisasikan tujuan kebijakan dalam bentuk program maupun peraturan sebagai hasil dari kegiatan pemerintahan. Menurut Charles O. Jones (Ponto, Pioh, & Tasik, 2016) implementasi kebijakan publik adalah berbagai kegiatan dalam sebuah program yang dilaksanakan untuk menimbulkan dampak tertentu. Jadi pada prinsipnya implementasi kebijakan adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.

### **2.2.3 Model Implementasi Kebijakan**

Dalam mengkaji implementasi pendidikan inklusif peneliti menggunakan model implementasi kebijakan yang di sampaikan oleh Charles O. Jones. Menurut Charles O. Jones implementasi kebijakan publik (Ponto, Pioh, & Tasik, 2016) adalah berbagai kegiatan dalam sebuah program yang dilaksanakan untuk menimbulkan dampak tertentu, yang mana ada tiga ukuran keberhasilan diantaranya organisasi, interpretasi, dan aplikasi. . (1) Organisasi

: membangun atau mengatur kembali sumber daya, bagian, dan tata cara agar kebijakan dapat memberi pengaruh. Lembaga atau institusi sangat penting keberadaannya karena menjadi wadah untuk mengatur kebijakan publik, didalamnya terdapat bagian – bagian yang memiliki tugas dan fungsi yang berbeda – beda. Sehingga tata cara pelaksanaan kebijakan dapat dikelola agar mampu mencapai tujuan yang ditetapkan. (2) interpretasi : mengartikan isi suatu kebijakan agar mudah dimengerti sehingga dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik oleh pelaksana kebijakan. Kebijakan publik yang telah dibuat oleh pemerintah pusat akan diteruskan ke pemerintah provinsi, kota/ kabupaten, kelurahan dengan mensosialisasikan secara bertahap dan ditafsirkan dalam bentuk peraturan maupun program. (3) Aplikasi : ketetapan yang dilaksanakan secara teratur dari pembayaran, pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kebijakan publik yang sudah berlaku dilaksanakan dalam bentuk sebuah program kerja dimasing – masing bagian dengan arah dan tujuan yang telah ditetapkan. (Ananda , Rosyidi , & Zetra, 2021).

#### **2.2.4 Konsep Pendidikan Kebijakan inklusif**

Pendidikan inklusif merupakan pendidikan yang memiliki konsep non diskriminasi yang mana semua anak yang berkebutuhan khusus maupun yang tidak dapat berkumpul dalam satu kelas. Dalam pengertian yang lebih luas pendidikan inklusif dapat dipahami sebagai transformasi pendidikan yang berpaku pada pendidikan non diskriminasi, hak bersama dalam mengenyam pendidikan, mendapatkan kesempatan yang sama, dapat diakses semua kalangan, meningkatkan kualitas pendidikan dan usaha untuk mengubah perspektif keliru masyarakat yang menganggap anak berkebutuhan khusus tidak bisa apa – apa (Rombot, 2021).

Landasan hukum pendidikan inklusif nasional tercantum pada undang – undang nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat yang menyatakan bahwa hak orang berkebutuhan khusus diakui dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat dan mendapatkan kempatan hidup layak. Berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus yang memiliki keterbatasan dan memiliki potensi intelegensi dan/ talenta khusus. Sehingga dapat disimpulkan bahwa negara memberikan perlindungan kepada semua kalangan terutama anak berkebutuhan khusus untuk mendapatkan pendidikan yang setara dengan siswa pada umumnya. Pendidikan inklusif merupakan

konsep yang menghargai dan merangkul semua kalangan tanpa adanya diskriminasi (Khairiyah, 2021).

Setiap siswa yang memiliki keterbatasan pada fisik, psikis, emosi atau memiliki intelegensi dan/ atau talenta tertentu haknya diakui untuk mengikuti pembelajaran formal di institusi pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Keterbatasan yang dimaksud menurut Peraturan menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 70 Tahun 2009, diantaranya:

- a. Tunarungu
- b. Tunanetra
- c. Tunagrahita
- d. Tunadaksa
- e. Tunalaras
- f. Tunaganda
- g. Tunawicara
- h. Kesulitan belajar
- i. Lamban belajar
- j. Memiliki gangguan motorik
- k. Autis
- l. Menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang dan zat adiktif lainnya

Ada beberapa prinsip penyelenggaraan pendidikan inklusif, diantaranya:

- a. Pendidikan yang ramah, Lingkungan yang ramah untuk belajar bagi siswa – siswi yang mana murid dan tenaga pendidik membuat sebuah perkumpulan berbasis keluarga yang menempatkan murid sebagai pusat perhatian, sehingga mampu memotivasi murid untuk belajar dan tenaga pendidik sebisa mungkin memberikan metode belajar terbaik untuk anak didiknya.
- b. Mengakomodasi kebutuhan, memberikan fasilitas penunjang kepada semua siswa- siswi sebagai usaha untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu pendidikan. Maka diharapkan penyelenggara pendidikan harus memberikan fasilitas berupa akomodasi sebagai penunjang pembelajaran siswa – siswi. Akomodasi tersebut diantaranya: (1) menggunakan kurikulum yang sesuai dengan



kebutuhan masing – masing peserta didik sesuai dengan kebutuhan, (2) mengawasi keadaan siswa- siswi, yakni memperhatikan setiap kapasitas dan kebutuhan peserta didik yang mana berupa gaya belajar dan tingkat pemahamannya, (3) tenaga pendidik harus berkreasi memanfaatkan sumber daya yang ada disekitar lingkungan sebagai metode pembelajaran, (4) menggunakan strategi pembelajaran yang berbeda – beda dan tertata agar dapat diterima semua peserta didik dan tanpa ada yang merasa terdiskriminasi, (5) melakukan koordinasi dengan berbagai elemen yang terkait untuk menunjang dan meningkatkan proses serta mutu pembelajaran bagi peserta didik.

- c. Mengembangkan talenta dan minat peserta didik semaksimal mungkin, pendidikan inklusif berusaha memberikan dukungan bagi semua peserta didik terutama anak berkebutuhan khusus agar setiap hambatan yang dimiliki dapat diatasi dengan kemampuannya dan dapat belajar dengan baik sehingga potensi setiap peserta didik bisa ditingkatkan (Sudrajat, 2021).

### **2.3 Kerangka Berpikir**

Kerangka berpikir dalam penelitian ini digunakan agar tidak terjadi kesalahan pemahaman dalam memahami tahapan tulisan dimana dituis batasan batasan pengertian konsep yang digunakan untuk pembahasannya. Dari teori menurut Charles O. Jones (2021, h. 150) dalam penelitian Ananda dkk, ukuran keberhasilan implementasi kebijakan publik ada tiga kategori, peneliti menggunakan 3 ukuran dalam teori implementasi kebijakan Charles O. Jones dalam penerapan pendidikan inklusif di Kabupaten Sidoarjo, sehingga bisa dilihat kerangka berpikir dibawah ini; kerangka berpikir menggunakan judul, sumber analisis penulis



Gambar 2.2.5 : Kerangka Berpikir (Sumber: Penulis)